

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SMP AMALIAH BOGOR DAN SMPN 1 DRAMAGA

Muhammad Rafli Sultoni<sup>1</sup>, Iwan Setiawan<sup>2</sup>, Afmi Apriliani<sup>3</sup>, Denny Hermawan

<sup>1,2,3,4</sup>Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>1</sup>Muhammad Rafli Sultoni, [d.2110647@unida.ac.id](mailto:d.2110647@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Iwan Setiawan, [iwan@unida.ac.id](mailto:iwan@unida.ac.id)

Korespondensi : Afmi Apriliani, [afmi.apriliani@unida.ac.id](mailto:afmi.apriliani@unida.ac.id)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini menilai pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi dari George Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kurikulum Merdeka dirancang untuk proses transparansi pada sektor pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa, serta untuk mendorong kreativitas, partisipasi, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang cukup, sikap positif dari guru dan staf pendidikan, serta struktur birokrasi yang efisien. Dengan memperhatikan dan mengelola keempat aspek ini secara efektif, diharapkan Kurikulum merdeka bertujuan melakukan perkembangan pada sektor pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, mengasah potensi – potensi pada siswa serta mencetak sumber daya manusia yang dapat bersaing pada era globalisasi dan tantangan pada masa yang akan datang.

**Kata Kunci : Impelemtasi, Kurikulum Merdeka, Pendidikan**

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen krusial guna mempercepat perkembangan suatu negara serta melaksanakan proses perkembangan sumber daya manusia. Peran pendidikan sangat vital dalam mengembangkan potensi individu agar dapat mengikuti kemajuan negara. Oleh sebab itu, persiapan dalam bidang pendidikan mempersiapkan dan mengasah kemampuan setiap individu. Pendidikan yang berkualitas dan terus berkembang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan serta menjadi pusat yang mencetak generasi yang kolaboratif, inovatif, dan kreatif. (Sutri Ramah & Miftahur Rohman, 2023) Pendidikan harus terstruktur dan memiliki ketentuan yang jelas, termasuk persiapan yang kompeten, tujuan yang tepat sasaran, kebijakan yang terintegrasi, koordinasi yang terstruktur, serta pengawasan yang disiplin dan terarah. Dalam mencapai keberhasilan, diperlukan regulasi yang berkolaborasi dengan pihak – pihak terkait, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan. (Fadhli, 2022) Persiapan pada era globalisasi menjadi tantangan dalam perkembangan sumber daya manusia, yang mengharuskan unggul dalam setiap sektor, termasuk pada sektor Pendidikan. Pendidikan merupakan factor yang sangat penting guna mencapai masa depan negara yang baik. UUD 1945 mengamanatkan untuk mencerdaskan bangsa. (Apriliani et al., 2024)

Tujuan kurikulum merdeka adalah untuk menghadapi atas tertinggalnya proses pembelajaran akibat terjadinya penyebaran Covid-19, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia dapat setara pada tingkat Internasional. Siswa mendapatkan banyak pilihan untuk melanjutkan bidang studi sesuai dengan minat mereka. (Aulia et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pada ketentuan umum butir 6, menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

tutor, instruktur, dan fasilitator yang berperan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang pengajar dapat diandalkan sebagai pendidik. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar di kelas, semua peserta didik membutuhkan pendidik untuk membantu dan membimbing mereka dalam proses perkembangan, sehingga mereka menjadi individu yang berpotensi dan kompeten. Tanpa pendidik, peserta didik tidak dapat sepenuhnya mencapai tujuan hidup mereka.

Regulasi publik adalah rangkaian – rangkaian keputusan yang disarankan oleh individu, komunitas, atau pemangku jabatan pada salah satu konteks, setiap keputusan pasti ada hambatan dan kesempatan. Regulasi disarankan guna membantu mengatai hambatan tersebut serta diharapkan dapat menjadi salah satu elemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Leo Agustino, 2012:7).

George Edward III (dalam Nugroho, 2014:636) menyatakan bahwa hambatan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Menurutnya, tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan tidak akan berhasil dijalankan. Untuk memastikan implementasi yang efektif, Edward menyarankan agar memperhatikan empat elemen utama: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

Kebijakan ini berperan sangat penting sebagai inti dari sistem pendidikan. (Alimuddin, 2023) Kurikulum mencakup harapan dan perencanaan dari siswa guna dapat di bimbing oleh guru, baik itu melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, pada saat dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi, program Kurikulum Merdeka adalah program pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dengan konten yang lebih optimal bagi siswa, memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang lebih efektif dalam mempelajari pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar

untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari satu fase, yaitu fase D, yang ditujukan bagi siswa kelas VII hingga IX. (Wahyuningsih et al., 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dengan cara metode penelitian kualitatif guna mendapatkan persepsi yang bisa dijalankan, implementasi kurikulum merdeka yang masih relatif belum banyak diketahui. (Giyanto et al., 2023) Teknik pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, penelitian kepustakaan, dan lain – lain. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, siswa siswi, dan stakeholder terkait lainnya sejumlah 10 informan . Wawancara akan difokuskan pada persepsi mereka tentang implementasi kurikulum merdeka, serta saran untuk perbaikan. Studi kasus dilakukan studi kasus mendalam di SMP Amaliah dan SMP Negeri 1 Dramaga yang memengaruhi implementasi kurikulum merdeka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan kurikulum merdeka merupakan program inovatif serta memiliki potensi guna mendapatkan manfaat bagi siswa dan sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Namun, seperti halnya setiap program pendidikan, kurikulum merdeka juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan, penting untuk mempertimbangkan baik keunggulan maupun kelemahan dari setiap program, serta mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya.(Septiani, 2023) Kebijakan ini menitikberatkan untuk melaksanakan ide kreatif serta kebebasan. Pemerintah telah mengenalkan program yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi kurikulum ini pada tiap – tiap sekolah. Memiliki tujuan agar dapat memberikan manfaat kepada proses pertumbuhan generasi penerus dan

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang mengacu kepada Pancasila serta memiliki karakteristik yang unggul (Halimah et al., 2023) Program unggulan lainnya yang bergerak pada sektor pendidikan adalah guna mencapai tujuan dari pendidikan di Indonesia dengan harapan menjadi negara yang dapat bersaing pada tingkat internasional dengan memiliki karakter yang kuat pada proses terciptanya pelajar yang mengamalkan isi Pancasila. Program pendidikan tersebut berfokus untuk perkembangan pelajar secara holistik.(Wijayanti & Tirtoni, 2024)

#### Komponen Utama Kuriulum Merdeka

1. Intrakuriuler

2. Kokulikuler (pemberntukan karakter P5)

Pembentukan karakter dalam Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk menciptakan generasi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Eksra kurikuler

#### Kelebihan Kurikulum Merdeka Belajar

1. Fleksibilitas dalam pembelajaran : Memberikan keleluasaan untuk institusi Pendidikan dalam melakukan proses perkembangan materi untuk disesuaikan pada kebutuhan serta potensi dari siswa
2. Mendorong Kreativitas dan Inovasi : Kurikulum ini menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar.
3. Berfokus pada Pengembangan Karakter : Tidak hanya pada pengetahuan akademis, tetapi memfokuskan proses perkembangan etika dan moral. Siswa diberi pengetahuan guna menjadi pribadi yang memiliki integritas dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi

## Kekurangan Kurikulum Merdeka Belajar

Meskipun Kurikulum Merdeka memiliki banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kekurangannya:

1. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Guru : Keterbatasan sosialisasi tentang metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum ini bisa menghambat implementasinya.
2. Kesenjangan Fasilitas dan Sumber Daya : Ketidakmerataan sumber daya antara sekolah di perkotaan dan pedesaan bisa menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kurikulum.
3. Kompleksitas Penerapan : Penerapan kebijakan ini memerlukan perkembangan dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang dapat menjadi tantangan bagi sekolah dan guru. Struktur birokrasi yang kompleks dan prosedur administratif yang Panjang dapat memperlambat proses penerapan kebijakan
4. Resistensi terhadap Perubahan: Adaptasi terhadap pendekatan pengajaran yang baru dan lebih fleksibel memerlukan waktu dan usaha yang signifikan.

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMP Amaliah Ciawi dan SMP Negeri 1 Dramaga menurut teori George Edward III yang terbagi menjadi 4 (empat) dimensi yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

### 1. Dimensi Komunikasi

Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam implelementasi kebijakan memahami apa yang harus dilakukan dan mengapa kebijakan memahami apa yang harus dilakukan dan mengapa kebijakan

tersebut penting. Informasi harus jelas, konsisten, dan sampai kepada semua pihak terkait. Untuk implementasi kurikulum Merdeka ya dari hasil komparasi kedua Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut penting bahwa sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya menerima informasi yang lengkap dan jelas tentang tujuan, manfaat dan langkah – langkah implementasi kurikulum baru ini.

## 2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, termasuk dana, tenaga kerja, perlengkapan, dan waktu. Dari hasil informasi yang peneliti dapatkan, sekolah harus memiliki akses ke sumber daya yang memadai, seperti anggaran untuk pelatihan guru, materi pembelajaran yang sesuai, sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan kurikulum yang baru. Ketersediaan sumber daya ini penting agar implementasi dapat berjalan lancar dan efektif

## 3. Dimensi Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan. Kebijakan akan lebih efektif jika mereka yang bertanggung jawab atas implementasinya memiliki sikap positif dan dedikasi terhadap kebijakan tersebut. Dalam penerapan kurikulum Merdeka pada kedua SMP tersebut adalah guru dan staf Pendidikan harus memiliki sikap positif dan komitmen terhadap kurikulum Merdeka. Mereka harus melihat manfaat dari kebijakan ini dan termotivasi untuk menerapkannya dengan baik. Dukungan dari pimpinan sekolah dan pengakuan atas usaha para guru juga akan meningkatkan disposisi positif.

## 4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada aturan, prosedur, dan mekanisme yang mendukung implementasi kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien akan

membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Struktur birokrasi pada kedua SMP yang menjadi subjek penelitian tersebut adalah implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan struktur birokrasi yang mendukung, termasuk prosedur yang jelas untuk pelatihan guru, distribusi materi pembelajaran, dan mekanisme evaluasi dan umpan balik. Birokrasi yang efisien akan memastikan bahwa proses implementasi berjalan dengan baik dan dapat menyesuaikan jika ada kendala.

Dengan memperhatikan dimensi – dimensi ini, implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan lebih efektif, memastikan bahwa tujuan dari kurikulum ini tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh semua peserta didik.

#### Hasil Wawancara SMP Negeri 1 Dramaga dan SMP Amaliah Ciawi

Sumber/Informan	Dimensi	Indikator	SMPN 1 Dramaga	SMP Amaliah Ciawi
1. Kepala Sekolah 2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 3. Staff Pengajar/Guru Kelas 7	Komunikasi	1. Bagaimana komunikasi dilakukan antara Kepala Sekolah dengan Staf Guru/Pengajar pada kelas 7?	Baik, dengan selalu diadakan rutinitas 2x dalam 1 bulan konunutas belajar. Menceritakan permasalahan yang di alami setiap guru.	Cukup baik, karena adanya rapat pertemuan yang diadakan seminggu sekali dalam membahas peningkatan pembelajaran di sekolah.
		2. Apakah diperlukan adanya pengawasan langsung untuk staf pengajar dalam penerapan	Perlu, dengan adanya supervisi	Sangat perlu, agar penerapan kurikulum merdeka di SMP Amaliah terus meningkat dengan baik.

		kurikulum merdeka di kelas?		
Sumber Daya	1. Apakah ada program pelatihan dan pengembangan untuk Staf Pengajar yang menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini?	Kombel dan komunitas belajar.	Ada, dan dibahas dalam In House Training (IHT)	
	2. Bagaimana kepemimpinan memotivasi staf pengajar untuk berperan aktif dan kreatif penerapan kurikulum merdeka?	Memfasilitasi guru narasumber yang memahami kurikulum merdeka, memotivasi guru mengikuti bimtek, seminar, lokakarya, dan bersama belajar melalui platform merdeka mengajar	Mempersilahkan guru mengikuti MGMP sesuai dengan bidang pelajaran yang diampunya.	
Disposisi	1. Strategi Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum dalam memastikan implementasi Kurikulum Merdeka yang efektif	Dengan mengajak para guru untuk aktif belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar, Mengikuti seri webinar, komunikasi belajar, dan praktik baik dan narasumber	Membuat pelatihan yang melibatkan semua guru, dan mengundang narasumber ahli untuk mensosialisasikan cara mengimplementasi kurikulum Merdeka dengan tepat	

	<p>2. Bagaimana Peran Wakasek Bidang Kurikulum dalam memastikan implementasi kurikulum yang memberikan kebebasan lebih kepada siswa dalam proses pembelajaran?</p>	<p>Peran aktif dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan guru sebagai faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum guna memotivasi belajar peserta didik</p>	<p>Membuat kuesioner yang dapat diisi oleh para siswa mengenai hal – hal yang berkenaan dengan topik P5. Sehingga dapat menjadi ide baru bagi waka kurikulum dalam mempraktekan P5.</p>
Struktur Birokrasi	<p>1. Apa langkah kongkrit yang diambil untuk melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses pengembangan pengembangan dan penyesuaian kurikulum merdeka?</p>	<p>Mengajak guru untuk memahami karakteristik satuan Pendidikan serta terlibat dalam perencanaan yang mencakup ATP, assessment, modul ajar, media pembelajaran, dan program prioritas satuan pendidikan</p>	<p>Mengadakan pelatihan yang bertema Kurikulum Merdeka dan membahas segala perangkat pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.</p>
	<p>2. Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Sekolah mendukung implementasi kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka?</p>	<p>Berperan sebagai mediator dan motivator dalam mendorong partisipasi guru dalam pelatihan kurikulum</p>	<p>Menjadi fasilitator sekaligus motivator dalam kegiatan pelatihan guru, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka.</p>

## Hambatan dan Tantangan kurikulum Merdeka

### 1. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Guru :

Banyak guru mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari Kurikulum Merdeka. Keterbatasan dan sosialisasi tentang kurikulum baru dapat menghambat penerapannya.

### 2. Sumber Daya Terbatas :

Keterbatasan sumber daya, baik itu finansial, material, maupun manusia, dapat menghambat pelaksanaan kurikulum secara efektif. Kurangnya fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi Pendidikan, dapat membatasi kreativitas dan partisipasi siswa.

### 3. Disposisi Guru dan Staf Pendidikan :

Sikap dan kesiapan guru serta staf Pendidikan dalam menerima dan menerapkan perubahan bisa menjadi kendala. Beberapa guru mungkin merasa terbebani dengan perubahan yang diperlukan oleh Kurikulum Merdeka

### 4. Struktur Birokrasi yang Kompleks :

Struktur birokrasi yang rumit dan prosedur administrative yang Panjang dapat memperlambat proses implementasi. Koordinasi yang kurang antara berbagai tingkat pemerintahan dan sekolah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia membutuhkan perhatian mendalam pada empat dimensi yang dijelaskan oleh George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar semua pihak memahami tujuan dan langkah-langkah kurikulum ini.

Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, materi pembelajaran, fasilitas, dan waktu, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Disposisi positif dan komitmen dari guru serta staf pendidikan akan mendorong penerapan yang lebih baik dan antusias. Dimensi terakhir, struktur birokrasi yang efisien dengan prosedur yang jelas, akan memastikan proses implementasi berjalan lancar dan mampu mengatasi tantangan yang muncul. Dengan memperhatikan dan mengelola keempat dimensi ini secara efektif, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan dengan sukses, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan potensi siswa secara optimal.

## REFERENSI

- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67–75. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995>
- Apriliani, A., Nursyahrani, A., Harefa, B. S., Febiantina, E. A., & Nurjanah, S. R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Kampus Mengajar (MBKM). *Karimah Tauhid*, 3(2), 2401–2411. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12101>
- Aulia, D., Hadiyanto, & Rusdinal. (2023). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Melalui Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 11(1), 122–133. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v11i1.25923>
- Fadhli, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/jee.v5i2.4230>
- Giyanto, B., Kurnia, P., Julizar, K., Sari, D. K., & Hartono, D. (2023). Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Dalam Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(2), 37–50.
- Halimah, N., Hardiyanto, & Rusdinal. (2023). Analisis Pembelajaran Berdiferensiasi

Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka. *Pendas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 08(01), 1–15. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/pgmi/article/view/3513/1247>

Septiani, P. (2023). Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dan efektivitas peran guru. *Conference*, 20, 587–591.

Sutri Ramah, & Miftahur Rohman. (2023). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 1(1), 97–114. <https://doi.org/10.62448/bujie.v1i1.23>

Wahyuningsih, R. S., Zahro, F., Anggrestia, N. V., & Putri, M. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama*. 2(2).

Wijayanti, A., & Tirtoni, F. (2024). Analisis Faktor Kendala dan Hambatan Guru SD Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Educatio*, 10(1), 304–311. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.7961>